

Abstrak

Secara peraturan perundang-undangan seseorang yang merupakan mantan narapidana korupsi tidak dilarang untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi di masyarakat Kudus tidak segan untuk memilih pasangan calon yang salah satunya merupakan mantan narapidana korupsi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih Bupati Kudus yang berstatus mantan narapidana dan untuk mengetahui budaya hukum yang ideal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan analisis data kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian adalah Mekanisme pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih Bupati Kudus yang berstatus mantan narapidana adalah *Pertama*, ditentukan oleh faktor perilaku memilih masyarakat Kudus yang masih permisif terhadap kasus tindak pidana korupsi. *Kedua*, faktor ideologi, faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor budaya. Budaya hukum masyarakat memilih Bupati yang ideal bagi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari karakteristik budaya hukum masyarakat Kudus yaitu secara substansi atau norma yang terkandung dalam peraturan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan nilai yang hidup pada masyarakat Kudus. Dan faktor yang mendorong budaya hukum memilih Bupati yang ideal yaitu berdasarkan pendidikan dan kebiasaan. Melalui ke 2 faktor tersebut diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat bahwa memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati mantan koruptor tidaklah tepat dikarenakan seorang mantan koruptor berpotensi untuk melakukan korupsi kembali (residifis).

UNISSULA
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Abstract

In legislation someone who is a former corruption convict is not prohibited from becoming a candidate for Regent and Deputy Regent but in the Holy community is not reluctant to choose a candidate pair, one of whom is a former prisoner of corruption. Therefore the purpose of this study is to find out and analyze elections Regent and Deputy Regent in Kudus Regency, To find out the faktors that influence the community in choosing the Holy Regent who is a former prisoner status and to know the ideal legal culture in the election of the Regent and Deputy Regent of Kudus. The method used in this study is a sociological juridical approach with qualitative data analysis, using primary and secondary data. The results of the study are the nominating mechanism for the election of Regents and Deputy Regents in Kudus Regency in accordance with the Constitutional Court ruling Number 42 / PUU-XIII / 2015 concerning the petition for judicial review of Article 7 letter (g) of Law Number 8 of 2015. Faktors the one that influenced the community in choosing the Kudus Regent who was a former prisoner status was determined by behavioral faktors in choosing the Kudus community which was still permissive towards corruption cases. Second, ideological faktors, political faktors, social faktors, economic faktors and cultural faktors. The legal culture of the community choosing the ideal Bupati for Kudus Regency can be seen from the characteristics of the legal culture of Kudus community, namely in substance or norms contained in the regulation, the election of the Regent and Deputy Regent of Kudus Regency is in accordance with the values that live in Kudus community. And the faktors that encourage the culture of legal culture choose the ideal regent based on education and habits. Through these two faktors, it is expected to change the public perception that choosing a candidate for regent and deputy regent ex-corrupt is not appropriate because a former corruptor has the potential to commit corruption again (residifis).

UNISSULA
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية